

Dr. Erlan Suwarlan, S.I.P., M.I.Pol.  
Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P.



*Metodologi*

**ILMU**



**Pemerintahan**

## Tentang Penulis



**Dr. Erlan Suwarian, S.I.P., M.I.Pol** lahir di Tasikmalaya 7 April 1977. Sejak 2005-2019 mengabdikan diri sebagai Dosen Tetap di STISIP Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini menjadi Dosen Tetap di FISIP Universitas Galuh, Ciamis Jawa Barat.

Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di SDN Nagarawangi 2 Tasikmalaya lulus pada tahun 1989, SMPN 2 Tasikmalaya lulus pada tahun 1992, SMAN 1 Tasikmalaya lulus pada tahun 1995.

Selanjutnya menyelesaikan Program Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di STISIP Tasikmalaya lulus pada tahun 2005, Program Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2013, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2019.

Mata kuliah yang pernah diampu 2006-2023 diantaranya: Pengantar Ilmu Pemerintahan, Sistem Pemerintahan Desa, Analisa Pemerintahan Indonesia, Perbandingan Sistem Pemerintahan, Asas-asas Manajemen, Isu-isu Politik dan Pemerintahan Kontemporer, Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan, Teori dan Filsafat Politik, Sistem Politik Indonesia, Sistem Pemerintahan Indonesia, Perencanaan Penelitian, Metode Penelitian Sosial, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Filsafat Ilmu, Manajemen Konflik, Sistem Akuntansi Pemerintahan, Teori Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Teori Politik, dan Proses Legislatif Di Indonesia. Pernah menjabat sebagai Sekretaris LPPM, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, Ketua Senat Akademik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pemerintahan *Kybermologist* di STISIP Tasikmalaya. Selanjutnya pernah menjabat sebagai Satuan Pengendali Mutu, Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan, dan saat ini sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Ilmu Pemerintahan di FISIP Universitas Galuh.



**Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P.**, kelahiran Bandung 22 Juni 1991 yang bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya. Meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Tahun 2019 dan gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Tahun 2021 di STISIP Tasikmalaya. Saat ini mengajar di PKBM Cerdik yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kota Tasikmalaya sejak Tahun 2019. Selain itu, aktif menjadi Tutor mata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan, Sistem Pemerintahan Indonesia, dan Sistem Politik Indonesia di Universitas Terbuka sejak 2021. Jurnalnya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tasikmalaya" diterbitkan *The Indonesian Journal of Politics and Policy* Vol 3 No 1 Tahun 2021. Penulis bisa disapa lewat email: [yuniwidiawati6@gmail.com](mailto:yuniwidiawati6@gmail.com)

# METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

Dr. Erlan Suwarlan, S.IP., M.I.Pol  
Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P.



**eureka**  
media aksara

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

**Penulis** : Dr. Erlan Suwarlan, S.IP., M.I.Pol  
Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Rizki Rose Mardiana

**ISBN** : 978-623-151-618-3

**No. HKI** : EC00202391014

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap Puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, atas segala limpahan Rahmat, dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul: **Metodologi Ilmu Pemerintahan**.

Ilmu Pemerintahan selalu menarik untuk diperbincangkan karena sepanjang entitas pemerintahan level manapun ada, maka Ilmu Pemerintahan diharapkan dapat menjelaskan berbagai gejala, peristiwa, dan fenomena pemerintahan yang selalu dinamis dan menarik untuk diteliti.

Sebagian mahasiswa Ilmu Pemerintahan Program Sarjana yang dikatakan sebagai peneliti pemula seringkali dihadapkan pada kesulitan-kesulitan dalam mempersiapkan rencana risetnya. Lahirnya buku ini sebagai ikhtiar sederhana menghadirkan alternatif referensi untuk membekali mahasiswa dalam mempersiapkan tugas akhirnya dengan baik.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Metodologi Ilmu Pemerintahan sebagai sebuah mata kuliah adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa agar dapat menghasilkan tugas akhir yang sesuai dengan objek forma Ilmu Pemerintahan.

Lahirnya Metodologi Ilmu Pemerintahan diakui atau tidak menunjukkan bertambahnya kemandirian atau kematangan Ilmu Pemerintahan. Penelitian-penelitian Ilmu Pemerintahan tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang Metode Penelitian Sosial, jauh lebih spesifik adalah memahami Metodologi Ilmu Pemerintahan yang notabene bagian dari epistemologi dalam konteks Filsafat sebagai induknya ilmu.

Penelitian-penelitian mahasiswa Ilmu Pemerintahan diharapkan memberikan kontribusi keilmuan sehingga semakin memperkuat dan lebih mematangkan kemandirian eksistensinya saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini sangat jauh untuk dikatakan sempurna, hal ini lebih dikarenakan keterbatasan penulis, Oleh karena itu masukan dari semua pihak atas penulisan buku ini sangat diharapkan guna memperbaiki semua yang tersaji.

Demikian semoga buku ini bermanfaat terutama bagi mahasiswa yang sedang mencari isu/topik untuk bahan penulisan karya ilmiah.

Tasikmalaya, 24 September 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>	
<b>BAB 1</b>	<b>ILMU, PENGETAHUAN DAN PERKEMBANGAN PARADIGMATIK ILMU PEMERINTAHAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Konsep Ilmu dan Pengetahuan .....	1
	B. Perkembangan Ilmu Pemerintahan .....	10
	C. Pemerintah Sebagai Studi/Kajian: Menjadi Bagaian atau Digabung dengan Ilmu lain (dalam Ilmu Politik) .....	13
	D. Perkembangan Paradigmatik Ilmu Pemerintahan .....	14
<b>BAB 2</b>	<b>KEBENARAN ILMIAH DAN METODOLOGI</b> .....	<b>17</b>
	A. Kebenaran Ilmiah .....	17
	B. Ukuran Kebenaran Ilmiah .....	20
	C. Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Pemerintahan .....	22
	D. Hubungan Metodologi, Metode, dan Teknik .....	29
	E. Metodologi Ilmu Pemerintahan .....	34
<b>BAB 3</b>	<b>RUANG LINGKUP PENELITIAN PEMERINTAHAN</b> .....	<b>38</b>
	A. Penelitian Pemerintahan .....	38
	B. Karakter Penelitian Pemerintahan .....	40
	C. Problem Perkembangan Ilmu Pemerintahan .....	43
	D. Materi Ilmu Pemerintahan (Konsep-Konsep Pemerintahan) .....	46
	E. Etika dalam Analisa dan Penelitian Pemerintahan .....	48

<b>BAB 4</b>	<b>METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN REFORMATIF .....</b>	<b>49</b>
	A. Analisis Metodologi Ilmu Pemerintahan Reformatif .....	49
	B. Analisis Paradigma.....	50
	C. Analisis Pendekatan .....	51
	D. Analisis Metode .....	53
	E. Analisis Pilar Kajian.....	54
	F. Analisis Konstruksi.....	57
<b>BAB 5</b>	<b>KONSEP DAN TEORI ILMU PEMERINTAHAN .....</b>	<b>60</b>
	A. Pengertian Konsep .....	60
	B. Pengertian Teori.....	61
	C. Hubungan Teori dengan Penelitian .....	63
	D. <i>Grand Theory, Midle Range Theory Dan Applied Theory (Ilmu Sosial)</i> .....	65
<b>BAB 6</b>	<b>GENERALISASI DALAM ILMU PEMERINTAHAN .....</b>	<b>68</b>
	A. Fakta dalam Ilmu Sosial .....	68
	B. Generalisasi .....	69
	C. Perumusan dan Sifat Generalisasi.....	71
<b>BAB 7</b>	<b>METODE STUDI PERBANDINGAN .....</b>	<b>75</b>
	A. Metode Studi Perbandingan .....	75
	B. Perbandingan Kelembagaan Pemerintahan .....	79
<b>BAB 8</b>	<b>PENDEKATAN KELEMBAGAAN DAN PERILAKU .....</b>	<b>83</b>
	A. Pendekatan Kelembagaan.....	83
	B. Pendekatan Perilaku ( <i>Behavioral Approach</i> ).....	87
<b>BAB 9</b>	<b>PENDEKATAN LEGALISTIK .....</b>	<b>89</b>
	A. Pendekatan Legalistik dan Ciri-cirinya.....	89
	B. Pendekatan Legalistik untuk Menganalisis Gejala dan Peristiwa Pemerintahan .....	90
<b>BAB 10</b>	<b>PENDEKATAN SISTEMIK.....</b>	<b>95</b>
	A. Pengertian dan Ciri-ciri Pendekatan Sistemik.....	95

	B. Menganalisis Gejala dan Peristiwa Pemerintahan melalui Pendekatan Sistemik.....	99
<b>BAB 11</b>	<b>KONSEP PENDAHULUAN DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN.....</b>	<b>103</b>
	A. Studi Pendahuluan.....	103
	B. Pendekatan Judul dan Masalah dalam Penelitian Pemerintahan.....	104
	C. Konsep Dasar dalam Membuat Latar Belakang Penelitian Pemerintahan .....	107
	D. Konsep Dasar dalam Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Pemerintahan.....	114
<b>BAB 12</b>	<b>KONSEP TINJAUAN PUSTAKA DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN.....</b>	<b>119</b>
	A. Pemahaman Studi Kepustakaan dalam Penelitian Pemerintahan.....	119
	B. Pemahaman Tinjauan Pustaka dalam Penelitian Pemerintahan.....	121
	C. Pemahaman Kerangka Pemikiran Penelitian Pemerintahan.....	124
	D. Konsep Penelitian Terdahulu dalam Penguatan Tinjauan Pustaka Penelitian Pemerintahan.....	126
	E. Konsep Penyusunan Hipotesis dalam Penelitian Pemerintahan.....	128
<b>BAB 13</b>	<b>KONSEP DATA DAN ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN .....</b>	<b>130</b>
	A. Data dan Jenis Data Penelitian Pemerintahan.....	130
	B. Analisis Data dalam Penelitian Pemerintahan.....	132
	C. Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Penelitian Pemerintahan.....	134
	D. Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif Penelitian Pemerintahan.....	135

<b>BAB 14</b>	<b>KONSEP PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN .....</b>	<b>137</b>
	A. Substansi Pembahasan .....	137
	B. Penafsiran Hasil yang Sesuai Harapan .....	139
	C. Penafsiran yang Negatif .....	140
	D. Penafsiran Hubungan yang Tidak Tercantum dalam Hipotesis .....	141
<b>BAB 15</b>	<b>KONSEP KESIMPULAN DAN SARAN DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN.....</b>	<b>144</b>
	A. Konsep Kesimpulan dalam Penelitian Pemerintahan .....	144
	B. Konsep Saran dalam Penelitian Pemerintahan .....	147
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>149</b>
	<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>152</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Persamaan dan Perbedaan Ilmu-Ilmu Kenegaraan .....	4
Tabel 2. 1	Tahap Perkembangan Fungsi Ilmu Pemerintahan.....	27
Tabel 2. 2	Perbedaan Metodologi dengan Metode .....	30
Tabel 2. 3	Implikasi Metodologis Perkembangan Ilmu Pemerintahan.....	37
Tabel 3. 1	Urusan Pemerintahan .....	41
Tabel 8. 1	Perbedaan Institusionalisme dengan Behavioralisme .....	88
Tabel 9. 1	Perbandingan Paradigma Michael Barzelay, <i>Breaking Through Bureaucracy</i> .....	93
Tabel 10. 1	Sistem dilihat dari Tata Jenjang (Hierarki) .....	97
Tabel 11. 1	Perbandingan Jumlah Hari untuk Memulai Usaha.....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Awal Ilmu .....	2
Gambar 1. 2	Ilmu Bersifat Universal .....	3
Gambar 1. 3	Obyek Ilmu .....	4
Gambar 1. 4	Pendekatan Memandang Ilmu.....	7
Gambar 1. 5	Limas Ilmu .....	8
Gambar 1. 6	Jalur Transformasi Ilmu Pemerintahan.....	10
Gambar 2. 1	Kriteria Kebenaran Ilmiah.....	18
Gambar 2. 2	Etos Ilmu Sosial .....	18
Gambar 2. 3	Pengetahuan yang Dicari Melalui Ilmu .....	20
Gambar 2. 4	Embrio sebuah Metodologi Ilmu .....	20
Gambar 2. 5	Hubungan Metode Ilmu dengan Metodologi Penelitian.....	30
Gambar 2. 6	Hubungan dalam Tujuan antara MIP dan MPS...31	
Gambar 2. 7.	Hubungan Filsafat, Statistik, MPS, Materi Ilmu Pemerintahan, dan MIP .....	31
Gambar 2. 8	Materi Metodologi dimasukkan dalam Filsafat Ilmu .....	32
Gambar 3. 1	Proses Penelitian Ilmiah .....	45
Gambar 4. 1	Berulang, Berpola/Bermodel, Bergeneralisasi/Berinduksi, Beruji/ Berbukti, Dan Bertesis) .....	54
Gambar 4. 2	Pilar Metodologi Ilmu Pemerintahan.....	56
Gambar 6. 1	Hubungan Ilmu, Teori, Generalisasi, Konsep, dan Fakta.....	70
Gambar 7. 1	Model Tiga Tahap Blondel .....	76
Gambar 7. 2	Model Empat Tahap Parson (Fungsionalisme).....	76
Gambar 7. 3	Lima Perbandingan Pemerintahan.....	77
Gambar 8. 1	Model Institusional .....	86
Gambar 9. 1	Model Perubahan Paradigma .....	92
Gambar 9. 2	Perubahan Paradigma di Bidang Pemerintahan.....	93
Gambar 10. 1	Sebuah Sistem yang dikelilingi oleh Lingkungannya .....	96

Gambar 10. 2	Mengidentifikasi Masalah Menggunakan Pendekatan Sistem.....	101
Gambar 10. 3	Rumus Mengidentifikasi Masalah.....	102
Gambar 11. 1	Pandangan Deduktif dan Induktif dalam penelitian Pemerintahan.....	106
Gambar 11. 2	Pola Kerja Penelitian.....	118
Gambar 12. 1	Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis/ Proposisi .....	129
Gambar 15. 1	Konsistensi Uraian.....	146
Gambar 15. 2	Kesimpulan Akhir .....	147



**METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN**

**Dr. Erlan Suwarlan, S.IP., M.I.Pol**

**Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P.**



# BAB

# 1

## ILMU, PENGETAHUAN DAN PERKEMBANGAN PARADIGMATIK ILMU PEMERINTAHAN

### A. Konsep Ilmu dan Pengetahuan

Kajian tentang Metodologi Ilmu Pemerintahan termasuk dalam tataran filsafat ilmu. Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian dan ciri-ciri ilmu, sehingga akan diperoleh kesamaan titik pandang.

Ada sebuah ungkapan populer bahwa sebuah ilmu itu berawal dari filsafat kemudian menjadi ilmu dan berakhir dengan seni. Saat ini, Ilmu Pemerintahan dapat dikatakan sebagai sebuah Seni. Ilmu sudah pasti pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan dapat dikatakan Ilmu.

# BAB

# 2

# KEBENARAN ILMIAH DAN METODOLOGI

## A. Kebenaran Ilmiah

Manusia berusaha mengembangkan ilmu dan pengetahuan demi memperoleh kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sejati. Sesuai dengan obyek ilmu yang bersifat empiris maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Seiring dengan perkembangan ilmu di dunia, teori pemerintahan pun mengalami pasang surut. Ketika masa reformasi di Indonesia, sejumlah teori dan paradigma pemerintahan yang digunakan selama ini dipertanyakan karena tidak mampu membantu menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, pemahaman konsep pemerintahan harus dilihat dalam gejala yang komprehensif.

# BAB 3

## RUANG LINGKUP PENELITIAN PEMERINTAHAN

### A. Penelitian Pemerintahan

Secara khusus dapat dijelaskan penelitian pemerintahan adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji: gejala, peristiwa, fenomena, dan dinamika pemerintahan guna menciptakan kebenaran ilmu pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik secara koherensi, korespondensi dan pragmatis yang berangkat dari pemikiran sistematis dengan kekuatan teoretik, legalistik, empirik, dan inovatif.

Jika melihat pengertian Penelitian Pemerintahan di atas, maka penelitian pemerintahan harus memiliki unsur:

1. Tidak terlepas dari **Kewenangan** dan **Pelayanan Publik**.
2. Menampilkan kebenaran: **koherensi**, **korespondensi**, dan **pragmatis**.
3. Memiliki kekuatan berpikir dalam: **teoretik**, **legalistik**, **empirik**, dan **inovatif**.

# BAB

# 4

## METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN REFORMATIF

### A. Analisis Metodologi Ilmu Pemerintahan Reformatif

Sejak berhentinya Presiden Soeharto tahun 1998, bergulir isu-isu reformasi nasional di Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk isu-isu reformasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sampai dengan saat ini, isu-isu tersebut terus berdinamika, terutama di tingkat daerah. Dinamika isu-isu pemerintahan ini merupakan fenomena, masalah, dan/atau permasalahan penelitian yang menarik untuk dikaji secara tematik dan berkelanjutan.

Tema-tema kajian pemerintahan bisa ditelusuri baik secara perspektif metodologi-ilmu maupun konseptual-teoretik; selain itu bisa juga secara ragam aspeknya.

Aspek-aspek dan/atau dimensi-dimensi pengkajian yang selama ini seringkali memberi kontribusi pengayaan pada kajian Ilmu Pemerintahan adalah dari studi filsafat, studi ideologi, ilmu politik, ilmu administrasi publik, studi kebijakan publik, sosiologi, psikologi, ilmu hukum tata negara, studi pertahanan dan keamanan, ilmu ekonomi, dan statistika baik dalam konteks di negara Indonesia maupun di negara lain.

Pada umumnya, reformasi pemerintahan akan meninggalkan nilai-nilai pemerintahan yang lama yang kemudian akan memunculkan bahkan membutuhkan nilai-nilai pemerintahan yang baru.

Metodologi Ilmu merupakan studi tentang metode-metode ilmiah untuk mengkaji pengetahuan secara ilmiah

# BAB 5

## KONSEP DAN TEORI ILMU PEMERINTAHAN

### A. Pengertian Konsep

Konsep dapat didefinisikan sebagai kata-kata “Penggambar” yang universal. Konsep merupakan salah satu simbol yang paling penting dalam bahasa. Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.

Oleh sebab itu konsep dapat diartikan pula sebagai hasil berpikir abstrak manusia yang merangkum banyak pengalaman, atau merupakan generalisasi sekelompok fenomena yang menggambarkan berbagai fenomena yang sama.

Contoh Konsep:

1. **Ilmu Politik;** “Kekuasaan”, “Demokrasi”, “Revolusi”, dll.
2. **Sosiologi;** “Status Sosial”, “Mobilitas Sosial”, “Alienasi”, dll.
3. **Ekonomi;** “Inflasi”, “Resesi”, dll.
4. **Ilmu Pemerintahan;** “Otonomi”, “Desentralisasi”, “Dekonsentrasi”, “Pelayanan Publik”, dll.

Jadi, konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Konsep digunakan dalam keseharian untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkatagorikan hal-hal yang ditemui berdasarkan ciri-ciri yang relevan.

Setiap disiplin ilmu mengembangkan konsep-konsepnya sendiri. Bagi Ilmuwan, konsep-konsep merupakan bahasa komunitasnya. Konsep dalam ilmu sosial menunjuk pada sifat-sifat dari objek yang dipelajarinya misalnya (orang, kelompok,

# BAB 6

## GENERALISASI DALAM ILMU PEMERINTAHAN

### A. Fakta dalam Ilmu Sosial

Ilmu Sosial sebagai suatu bidang studi mempunyai struktur, materi, sasaran dan metode yang berkarakteristik khas. Hakikat Ilmu Sosial mempunyai makna: ruang, waktu dan nilai/norma yang terkait dengan fakta, konsep dan generalisasi.

Tujuan Ilmu adalah membangun pengetahuan yang bersifat teoritis untuk dapat menjelaskan kenyataan empiris yang ada (Eksplanasi). Untuk mencapai tujuan ilmu perlu memahami gejala/fenomena yang terjadi dan menatanya, sehingga muncul konsep (Konseptualisasi). Gejala/fenomena tersebut diklasifikasi/ dikategorisasikan sehingga bisa dipahami dan tidak kontradiktif dengan logika.

Fakta merupakan kejadian atau suatu hal yang sifatnya berdiri sendiri. Kenyataan ini sering kita ketahui dan perlu dipahami sebagai bahan kajian yang penting untuk: diamati, dikaji, dan dianalisis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ciri-ciri fakta:

1. Dapat dibuktikan kebenarannya
2. Memiliki data yang akurat misalnya tanggal, tempat waktu kejadian
3. Memiliki narasumber yang dapat dipercaya
4. Bersifat objektif (apa adanya tidak dibuat-buat) dilengkapi data
5. Sudah dipastikan kebenarannya
6. Menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi
7. Kenyataan

# BAB

# 7

# METODE STUDI PERBANDINGAN

## A. Metode Studi Perbandingan

Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Menurut Hudson (2007:3) metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.

Menurut Surakhman (1986:84) mengatakan bahwa: "Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain.

Menurut Lipjhart (2007: 158) studi komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematis yaitu variabel yang bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variabel lainnya. Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada teritorial tertentu.

# BAB 8

## PENDEKATAN KELEMBAGAAN DAN PERILAKU

### A. Pendekatan Kelembagaan

Tanpa disiplin ilmu lainnya, Ilmu Pemerintahan tidak akan mampu menerangkan gejala-gejala pemerintahan yang terjadi. Oleh sebab itu, sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum (terutama hukum tata negara), ilmu administrasi negara sangat berguna dalam analisa pemerintahan.

Penggunaan pendekatan-pendekatan dalam menganalisa dan memahami gejala-gejala pemerintahan itu bertujuan untuk:

1. Mempelajari pemerintahan dengan membatasi jaringan ide-ide atau gagasan yang umum serta memfokuskan kepada hal-hal yang spesifik.
2. Mengorganisir konsep sehingga mencerminkan keterkaitan perkembangan ilmu pemerintahan.
3. Sebagai dasar ilmu pemerintahan, kita menganggap prinsip-prinsip tentang pemberdayaan, pelayanan dan pembangunan akan membuka kerangka yang harus dicapai oleh pemerintah.

Pendekatan kelembagaan biasanya digunakan dalam ilmu politik dan mulai berkembangnya sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini, negara atau pemerintah sebagai *body of politics* menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis.

Bahasan pendekatan institusional misalnya menyangkut:

1. Sifat UUD
2. UU tentang Pemerintahan Daerah

# BAB

# 9

# PENDEKATAN LEGALISTIK

## A. Pendekatan Legalistik dan Ciri-cirinya

Ilmu Pemerintahan di Indonesia awalnya dikembangkan sebagai bagian dari ilmu hukum. Sehingga tidak mengherankan apabila kajian ilmu pemerintahan dapat dilakukan melalui pendekatan legalistik (*legalistic approach*). Pemerintahan adalah gejala yang sah (kewenangan), sehingga kegiatan pemerintahan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu gejala dan peristiwa pemerintahan yang dapat dilihat dari pendekatan legalistik adalah pada saat: membuat kebijakan, memberikan pelayanan, dan menegakkan aturan. Di tingkat nasional wujudnya berupa aktivitas oleh polisi dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di tingkat daerah adalah Satpol PP dan PPNSD.

Pendekatan legalistik adalah salah satu cara untuk melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang aturanaturan formal. Hal tersebut sekaligus menjadi ciri yang membedakan ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kajian-kajian pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur berjalannya pemerintahan.

Ciri-ciri pendekatan legalistik dalam mempelajari ilmu pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dari dasar hukum yang mengaturnya (hukum positif).

# BAB 10 | PENDEKATAN SISTEMIK

## A. Pengertian dan Ciri-ciri Pendekatan Sistemik

Pemerintahan pada semua tingkatan pada dasarnya adalah sebuah sistem. Sistem adalah himpunan dari komponen yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Diantara komponen-komponen terdapat hubungan fungsional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, sebuah sistem meliputi:

1. Komponen-komponen atau unsur-unsur
2. Masing-masing komponen mempunyai hubungan fungsional
3. Komponen-komponen tersebut tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh untuk semua tujuan tertentu yang akan dicapai.

Analogi berikut dapat membantu menjelaskan pengertian sistem. Sebuah jam dinding merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah bagian atau komponen baik yang kecil maupun yang besar. Komponen-komponen jam tersebut belum membentuk sebuah jam apabila belum diatur dengan cara atau metode tertentu, guna mencapai tujuan atau kegunaan dari jam tersebut yang merupakan sebuah sistem yaitu menunjukkan waktu baik tanggal, hari, bulan, tahun, jam, menit dan terkecil detik. Komponen-komponen yang ada saling berinteraksi, saling mempengaruhi dengan cara sedemikian rupa, hingga terwujud kerjasama sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem.

# BAB 11

## KONSEP PENDAHULUAN DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN

### A. Studi Pendahuluan

Sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, peneliti menjajaki kemungkinan apakah penelitian dapat dilanjutkan atau tidak. Studi pendahuluan dilakukan untuk mempertajam arah studi utama, yaitu mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya.

Penelitian pemerintahan yang benar dan paripurna senantiasa harus berangkat dari masalah, bukan dari judul. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif dalam Ilmu Pemerintahan sebaiknya selalu berangkat dari masalah, bukan dari judul.

Hal tersebut menjadi pondasi dasar agar terjadi korelasi pola pikir peneliti dengan objek penelitiannya karena dirasakan agar semua peneliti mengadakan penjajagan mengenai kemungkinanterus atau terhentinya keinginan kuat peneliti untuk mengadakan penelitian.

Penelitian pendahuluan dilakukan oleh peneliti terutama untuk menjejaki dapat tidaknya suatu penelitian dilaksanakan di daerah itu. Dengan alasan itu, maka penelitian pendahuluan ini sering disebut dengan *feasibility study* (studi kemungkinan). Berangkat dari studi pendahuluan, akan mengajarkan peneliti untuk mengetahui apakah rencana penelitiannya memang masih ada kemungkinan untuk dilaksanakan atau tidak. Jika memang dari hasil penelitian pendahuluan tersebut tampak bahwa rencana penelitiannya lebih baik dihentikan daripada

# BAB 12

## KONSEP TINJAUAN PUSTAKA DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN

### A. Pemahaman Studi Kepustakaan dalam Penelitian Pemerintahan

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, dimana secara umum penelitian haruslah memiliki sifat sebagai berikut:

1. Penemuan; merujuk pada data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diharapkan menghasilkan data yang benar dan belum pernah ada sebelumnya.
2. Pembuktian; data yang diperoleh itu dipergunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu.
3. Pengembangan; hasil sebuah penelitian merupakan pendalaman dan perluasan pengetahuan yang telah ada maupun yang baru.

Jika berbicara mengenai studi kepustakaan, mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan maupun ilmuwan lainnya sering menganggap bahwa studi kepustakaan adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan buku” sehingga para ilmuwan menganggap bahwa “studi kepustakaan” bisa dianggap sebagai “tinjauan pustaka” tetapi banyak juga ilmuwan yang menganggap bahwa “studi kepustakaan” itu lebih besar dan lebih dalam dari hanya sekedar sebuah “tinjauan pustaka”, namun ada yang lebih hebat lagi dimana banyak ilmuwan mengklasifikasikan “tinjauan pustaka” sebagai bagian dari “studi dokumentasi”

# BAB 13

## KONSEP DATA DAN ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN

### A. Data dan Jenis Data Penelitian Pemerintahan

Pada umumnya aktivitas penelitian baik penelitian sosial maupun penelitian pemerintahan tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah kumpulan datum (data tunggal) dari banyaknya fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1. **Data Primer;** data yang diperoleh/dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya yang sifatnya *up to date*. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkannya, misalnya: observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), Angket.
2. **Data Sekunder;** data yang diperoleh/dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua), misalnya: RPJMD, Data daerah dalam Angka, buku, laporan, jurnal, prosiding, dll.

Data sekunder dapat dipergunakan untuk:

1. Pemahaman Masalah; sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.

# BAB

# 14

## KONSEP PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN

### A. Substansi Pembahasan

Membicarakan Pembahasan dalam penelitian adalah membicarakan bagian yang dianggap paling sulit. Pada bagian inilah sesungguhnya kita mempertemukan antara teori yang digunakan dengan temuan data/fakta di lapangan.

Ketika mempertemukan antara teori yang digunakan dengan temuan data/fakta di lapangan, maka penguasaan terhadap teori dan data/fakta yang ditemukan di lapangan menjadi keniscayaan. Dengan menguasai kedua hal tersebut, substansi pembahasan akan sangat menarik dan berpotensi besar memberikan kontribusi terutama terhadap pengembangan keilmuan.

Seringkali **Pembahasan** terlihat dangkal dan “Sangat Tidak Menarik”, biasanya disebabkan karena tidak menguasai kedua hal yang disebutkan tadi (teori dan data/fakta di lapangan).

Oleh karenanya keseriusan, kegigihan, dan ketelitian dalam pengumpulan data/fakta di lapangan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh peneliti, terlebih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.

Pembahasan yang umumnya terletak pada BAB IV, memiliki relevansi dengan BAB lainnya sejak awal, misalnya dengan:

1. **Rumusan Masalah** pada BAB I, bagian ini sebagaimana dijelaskan pada materi sebelumnya merupakan interest peneliti (hal yang ingin dicari jawabannya oleh peneliti).

# BAB 15

## KONSEP KESIMPULAN DAN SARAN DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN

### A. Konsep Kesimpulan dalam Penelitian Pemerintahan

Dari judul penelitian, akan diperoleh suatu petunjuk bahwa kesimpulan dalam penelitian bukanlah suatu karangan atau diambil dari pembicaraan-pembicaraan lain, akan tetapi merupakan hasil dari suatu proses tertentu, yaitu "menarik", dalam arti "memindahkan" sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.

Isi kesimpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terikat secara substantif dengan temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang diperoleh. Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang telah diuraikan secara lengkap dalam bab IV hasil penelitian.

Tata urutannya hendaknya sama dengan yang ada di dalam bab IV. Dengan demikian konsistensi isi dan tata urutan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian tetap terpelihara.

Sangat keliru, apabila peneliti membuat kesimpulan yang bertujuan untuk menyenangkan hati pemesannya dengan cara memanipulasi data. Dalam rumusan masalah, peneliti mengajukan pertanyaan dirinya tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Sehubungan dengan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dkk. 2009. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Chinn, Peggy L, Kramer. 2021. *Knowledge Development in Nursing E-Book: Theory and Process*, American Journal: Elsevier Health Sciences.
- Dougherty and Pfaltzgraff. 1990. *Contending Theories Of International Relations. A Comprehensive Survey 5th Edition*.
- Good, C.V and D.E Scates. 1954. *Methods of Research, Educational, Psychological, Sociological*. London:Appleton-Century-Crofts.
- Hanapiah, Pipin. 2016. Analisis Metodologi Ilmu Tentang Pemerintahan Reformatif Di Indonesia. Artikel pada Seminar Nasional APSIPI tentang “Reformasi dan Inovasi Tatakelola Pemerintahan” di Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 24–25 November 2016.
- Hasan, Erliana. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hoover, S. V., and R. F. Perry, 1989. *Simulation A Problem - Solving Approach. Digital Equipment Corporation & Northeastern University*.
- Hudson. 2007. *The Case for Work Life Balance: Closing the Gap Between Policy and. Practice*. Sydney: Hudson Highland Group, Inc.
- Hoy And Miskel. 2001. *Educational Administration, Teory, Research, And. Practice*. North America: Mc Graw-Hill.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh. 1995. *Studiying Public Policy: policy Cyles and Policy subsystem*. Oxford: Oxford University Press.
- Islamy, Muh.Irfan. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya.

- Kaho, Josep Riwu. 2022. *Prospek di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kerlinger N. Fred. 1998. *Azas-azas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Lijphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maxwell, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design, An Interactive A. Halroach*. California: Sage Publications, Inc.
- Muliawan, Jasa. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Jilid I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kybernologi Jilid II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Sirao Credtia Center (SCC) Jakarta: Bekerja sama dengan Yayasan Kybernologi Indonesia 9YKI)
- Pamudji, S. 1985. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara
- Ridley, FE. 1975. *The Study Of Government*. London George Allen & Unwin Ltd. London.
- Ripley, R.B. 1986. *Policy Analysis In Political Science*. Chicago: Nelson - Hall.
- Russell. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Diterjemahkan oleh Bambang Sukoco. Bandung: Armico.
- Simangunsong, Fernandes. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press
- \_\_\_\_\_.2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV Afabeta
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_.2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suriasumantri, Yuyun. S. 1987. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Ilmu dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan tentang Ilmu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Surakhmad, Winarno. 1986. *Metodologi Pengajaran Ilmiah*, Bandung. Cet III.
- Suryabrata. 1989. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suwaryo, Utang. 2020. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: KAPSIPI
- Stephen. P.R. 1994. *Teori Organisasi, Design dan Aplikasi*. Jakarta: (Terjemahan) Arcan.
- Van Peursen. 1989. *Susunan Ilmu Pengetahuan. Terjemahan*. BPK Gunung Mulya dan Kanisius.
- Vredembregt, J. 1981. *Metode dan Teknik Peneneitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wasistiono, Sadu., & Simangunsong Fernandes. 2009. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Cetakan kedua. Jakarta: Universitas Terbuka.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Edisi Revisi. Jatinangor: IPDN Press.
- Winardi, dan Nisjar. 1997. *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Erlan Suwarlan, S.IP., M.I.Pol** lahir di Tasikmalaya 7 April 1977. Sejak 2005-2019 mengabdikan diri sebagai Dosen Tetap di STISIP Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini menjadi Dosen Tetap di FISIP Universitas Galuh, Ciamis Jawa Barat

Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di SDN Nagarawangi 2 Tasikmalaya lulus pada tahun 1989, SMPN 2 Tasikmalaya lulus pada tahun 1992, SMAN 1 Tasikmalaya lulus pada tahun 1995.

Selanjutnya menyelesaikan Program Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di STISIP Tasikmalaya lulus pada tahun 2005, Program Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2013, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2019.

Mata kuliah yang pernah diampu 2006-2023 diantaranya: Pengantar Ilmu Pemerintahan, Sistem Pemerintahan Desa, Analisa Pemerintahan Indonesia, Perbandingan Sistem Pemerintahan, Asas-asas Manajemen, Isu-isu Politik dan Pemerintahan Kontemporer, Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan, Teori dan Filsafat Politik, Sistem Politik Indonesia, Sistem Pemerintahan Indonesia, Perencanaan Penelitian, Metode Penelitian Sosial, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Filsafat Ilmu, Manajemen Konflik, Sistem Akuntansi Pemerintahan, Teori Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Teori Politik, dan Proses Legislatif Di Indonesia. Pernah menjabat sebagai Sekretaris LPPM, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, Ketua Senat Akademik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pemerintahan *Kybernologist* di STISIP Tasikmalaya. Selanjutnya pernah menjabat sebagai Satuan Pengendali Mutu, Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan, dan saat ini sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Ilmu Pemerintahan di FISIP Universitas Galuh.



**Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P.**, kelahiran Bandung 22 Juni 1991 yang bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya. Meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Tahun 2019 dan gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Tahun 2021 di STISIP Tasikmalaya. Saat ini mengajar di PKBM Cerdik yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kota Tasikmalaya sejak Tahun 2019. Selain itu, aktif menjadi Tutor mata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan, Sistem Pemerintahan Indonesia, dan Sistem Politik Indonesia di Universitas Terbuka sejak 2021. Jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tasikmalaya” diterbitkan *The Indonesian Journal of Politics and Policy* Vol 3 No 1 Tahun 2021. Penulis bisa disapa lewat email: [yuniwidiawati6@gmail.com](mailto:yuniwidiawati6@gmail.com)



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202391014, 9 Oktober 2023

**Pencipta**  
Nama : **Dr. Erlan Suwarian, S.I.P., M.L.Pol dan Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P.**  
Alamat : Perum Tata Lestari Blok D-47 RT 02 RW 10 Desa Cikadongdong  
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya 46418,  
Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 46418

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Dr. Erlan Suwarian, S.I.P., M.L.Pol dan Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P.**  
Alamat : Perum Tata Lestari Blok D-47 RT 02 RW 10 Desa Cikadongdong  
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya 46418,  
Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 46418

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Metodologi Ilmu Pemerintahan**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Oktober 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000523969

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal permohonan memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.